

TIMBANGAN BUKU

AJAKAN SIMPATIK ROMO MAGNIS

Franz Magnis-Suseno SJ, *Mencari Sosok Demokrasi : Sebuah Telaah Filosofi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, xiv + 133 halaman, Rp. 9.000,-



Franz Magnis-Suseno, yang akrab disapa dengan Romo Magnis, termasuk penulis yang sangat produktif. Dalam usianya yang mendekati 60 tahun, ia telah menghasilkan sekitar 17 buku ilmiah dan ratusan karangan berbobot, baik dalam bahasa Indonesia maupun Jerman. Gaya bahasanya sangat enerjik, sama enerjik dengan penulisnya. Itulah sebabnya, kita mungkin tidak perlu heran mendapatkan orang seusia beliau, masih berani mengendarai sendiri sepeda motornya di tengah-tengah keganasan lalu lintas Jakarta tatkala ia pergi memberikan kuliah di Program Pascasarjana UI atau di STF Driyarkarya.

Buku *Mencari Sosok Demokrasi* ini adalah perluasan dari pidato pengukuhan Romo Magnis sebagai Guru Besar STF Driyarkara Jakarta bulan Desember 1994. Ketika itu ia menegaskan, bahwa proses pencarian sosok demokrasi bagi bangsa Indonesia masih belum berakhir. Demokrasi Pancasila baru akan menjadi mantap apabila kontekstualitas dan dinamika paham demokrasi itu diperhatikan.

Menurut penulisnya, buku ini mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menjajagi apa sebenarnya dasar klaim demokrasi atas legitimasi eksklusif kekuasaan pasca-tradisional. Di sini diperlihatkan, bahwa klaim demokrasi itu baru dapat muncul di zaman pasca-tradisional, dan bahwa di zaman pasca-tradisional tidak ada legitimasi kekuasaan politik selain yang demokratis. Dalam kaitan dengan ini, Romo Magnis mencoba merumuskan ciri-ciri negara demokratis itu. Kedua, untuk menghadapkan tuntutan-tuntutan demokrasi itu pada tantangan realisasinya di Indonesia. Di sini penulisnya mengangkat pokok-pokok perdebatan Demokrasi Pancasila tersebut dan kaitannya dengan tuntutan-tuntutan etika politik (hlm. vii-viii).

Buku ini dapat dikatakan memuat sebuah telaah yang komprehensif tentang demokrasi. Letak kelebihan buku ini dibandingkan dengan buku-buku sebelumnya adalah pada keberhasilan penulisnya membentangkan unsur-unsur demokrasi modern dan keberaniannya meletakkan unsur-unsur itu dalam bingkai pencarian demokrasi di Indonesia.

Menurut Romo Magnis, ada lima ciri hakiki negara demokratis itu, yakni: (1) negara hukum, (2) pemerintah yang di bawah kontrol nyata masyarakat, (3) pemilihan umum yang bebas, (4) prinsip mayoritas, dan (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis (hlm. 57-60). Ciri negara demokrasi seperti itu, menurut Romo Magnis, bukan hanya ditemukan di Barat. Artinya, kelima ciri itu berlaku dan harus ada untuk demokrasi di semua negara yang mengklaim dirinya demokratis di seluruh dunia.

Masalahnya, sebagaimana juga pernah diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hampir tidak ada negara yang tidak menyebut dirinya demokratis, terlepas apakah itu demokrasi liberal, sosialis, parlementer, Pancasila, atau sebutan apa lagi. Boleh jadi suatu negara mengklaim sebagai negara demokrasi, tetapi dalam praktik, pemerintahannya sama sekali tidak demokratis. Romo Magnis sendiri cukup realistis dengan menyatakan, bahwa apabila syarat-syarat objektif pemerintahan demokratis belum terdapat, tak ada landasan etis untuk menuntut demokrasi itu. Selain itu, ciri-ciri negara demokrasi itu sendiri terus berkembang, tidak pernah dan tidak mungkin pernah selesai. Demokrasi berkembang bersama dengan perubahan masyarakat. Inilah yang antara lain dimaksud Romo Magnis dengan demokrasi sebagai paham yang relatif, kontekstual, dan dinamis.

Sebelum memasuki diskursus tentang demokrasi di Indonesia, penulis buku ini mengingatkan tentang pengertian demokrasi secara formal dan substansial. Istilah demokrasi dalam arti formal ini diartikannya sebagai demokrasi menurut aturan di atas kertas. Sebaliknya, demokrasi dalam arti substansial adalah penerapannya di lapangan. "Demokrasi formal merupakan *a necessary*, tetapi bukan *a sufficient condition* bagi demokrasi secara substansial. Tanpa lembaga-lembaga demokratis tidak mungkin ada demokrasi. Tetapi apakah adanya lembaga-lembaga demokratis sudah menunjuk pada adanya demokrasi — jadi apakah dengan adanya demokrasi formal sudah terdapat demokrasi substansial — tergantung dari apakah lembaga-lembaga itu nyata-nyata melakukan fungsi demokratis yang menjadi maksud objektif mereka. Demokrasi bukan sekadar masalah simbol dan formalisme, melainkan tergantung apakah lima gugus ciri demokrasi tersebut di atas betul-betul terlaksana," demikian tegas Romo Magnis (hlm. 74-75). Kiranya patut dicatat di sini, bahwa peristilahan demokrasi formal dan substansial

(terminologi terakhir ini disebut pula, misalnya oleh Ismail Suny dalam bukunya *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, dengan demokrasi materiil) di atas berbeda makna dengan pengertian yang diberikan oleh BP-7 Pusat (1994). Dalam konteks pembicaraan tentang Demokrasi Pancasila, demokrasi dalam arti materiil adalah demokrasi dalam arti umum, yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Sebaliknya, bagaimana bentuk dan cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) merupakan pengertian demokrasi secara formal.

Kembali kepada diskursus demokrasi di Indonesia, Romo Magnis mengemukakan lima permasalahan yang kita hadapi bersama, yaitu: (1) kedudukan amat kuat pemerintah, khususnya presiden, menurut UUD 1945, sehingga patut dipertanyakan apakah kedudukan itu sesuai dengan cita-cita demokrasi; (2) bagaimana hak-hak asasi demokratis yang menjadi materi Pasal 28 UUD 1945 harus diinterpretasi; (3) bagaimana paham kebebasan pers yang bertanggung jawab perlu ditanggapi; (4) bagaimana kebebasan untuk membentuk partai politik seperti ditetapkan dalam undang-undang kepartaian; dan (5) bagaimana fungsi sosial politik ABRI dalam menjalankan dwifungsinya. Lima permasalahan ini seluruhnya dijawab oleh Romo Magnis secara panjang lebar. Sementara itu di masyarakat sendiri permasalahan tersebut terus bergulir dan mendapat *respons* yang beraneka ragam. Sebut saja sebagai contoh fenomena berdirinya berbagai organisasi kemasyarakatan baru dewasa ini. Menariknya, fenomena tersebut mengisyaratkan upaya mengungkit kenangan kita kepada romantisme politik sebelum tahun 1971, masa sebelum dilakukan fusi partai-partai Islam ke dalam PPP dan partai-partai nasionalis dan Kristen/Katolik ke dalam PDI, sehingga bersama dengan Golkar akhirnya hanya dikenal tiga kekuatan orsospol peserta pemilu.

Kendati pada "Kata Pengantar" Romo Magnis mengisyaratkan, bahwa dalam buku ini ia ingin berada di sudut netral — menghindari untuk memberikan penilaian mengenai kualitas demokrasi di Indonesia — ternyata di sana sini dapat dengan mudah dijumpai komentarnya tentang kasus-kasus tertentu yang pernah terjadi di Tanah Air, yang tidak lain, pada hakikatnya adalah penilaiannya tentang kualitas demokrasi pula. Bagi pembaca yang sering menyimak pendapat Romo Magnis, baik melalui buku, media massa, maupun sewaktu mendengarkan kuliahnya secara langsung, dan mengetahui kedekatannya dengan para aktivis demokrasi dan hak-hak asasi manusia di negeri ini, sebenarnya sejak awal sudah dapat menduga "sudut" mana yang dipilih penulis ini.

Sebagai renungan penutup, penulis buku ini memberikan sejumlah catatan (Bab 5). Pertama, untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, kita tidak perlu memulai dari nol. Betapapun lemahnya institusi-institusi demokratis di negara kita dan betapapun otoriter

dan paternalistik pola kehidupan politiknya, unsur-unsur demokratis itu ada, tidak hanya secara formal-institusional, melainkan secara substansial. Kedua, meskipun ada bibit-bibit substansial kehidupan demokratis, masih banyak yang perlu dikembangkan agar demokrasi Indonesia menjadi betul-betul substansial. Jadi tak ada alasan untuk bertopang dagu. Ketiga, dilihat dari sudut etika politik, peningkatan kadar kedemokratisan kehidupan politik Indonesia tidak perlu dilaksanakan dengan model banting stir, melainkan cukup dengan cara mengoreksi kepincangan dan distorsi intrinsik dalam dinamika sistem politik sekarang serta dengan mengembangkan dan membuat nyata lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Dalam buku yang sangat menarik ini, penulisnya sejak awal seperti menghindar untuk terlalu banyak menyebut-nyebut Demokrasi Pancasila. Ia lebih suka berbicara tentang demokrasi Indonesia. Hal ini ternyata disadari dan diakui secara jujur oleh Romo Magnis pada paragraf terakhir bukunya. Ia berharap, hal ini dapat dimaklumi. Menurutnya, untuk diskursus etika politik paham Demokrasi Pancasila, masih sangat kurang terdefinisi. "Namun sekarang," katanya, "saya mau kembali ke paham itu, karena yang perlu kita bangun bukan lain adalah demokrasi Pancasila. Sebuah demokrasi yang sungguh-sungguh demokratis, seratus persen demokratis, demokratis tanpa embel-embel, tetapi sesuai dengan, serta berdasarkan pada, nilai-nilai yang dijunjung tinggi serta disepakati bersama oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila." Suatu ajakan yang simpatik, bukan?

Imelda Martinelli